

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Mega Yunita Prassiwi

Nim 2021522544

Prodi : Akuntansi

**UNIVERSITAS DHARMA AUB
SURAKARTA**

2025

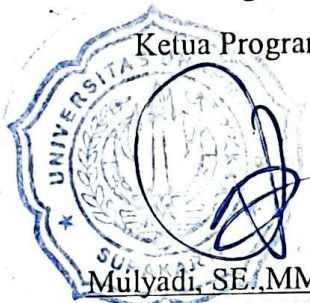
LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mega Yunita Prassiwi
NIM : 2021522544
Jurusan/ Progdi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah
Pembimbing : Ridwan Wahyudi, SE.,MM.

Surakarta, 4 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Mulyadi, SE.,MM.,Ak.,MH.
NIDN: 0610096501

Pembimbing

A blue ink signature of Ridwan Wahyudi, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

Ridwan Wahyudi,SE.,MM.
NIDN: 0616119401

A. JUDUL PROPOSAL

Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

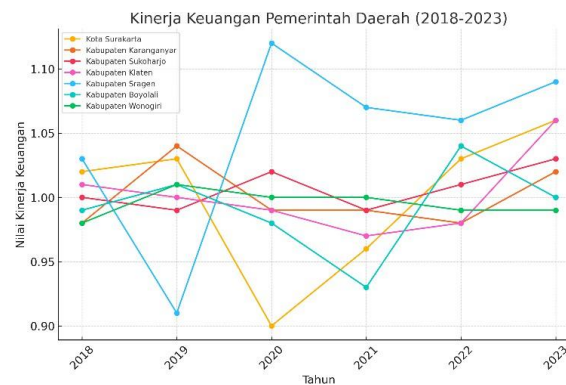
B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah daerah berperan penting sebagai perwakilan pemerintah pusat di setiap wilayah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki sebagian kewenangan dari pemerintah pusat untuk menangani permasalahan setempat serta mengoptimalkan potensi daerah guna menyejahterakan warganya. Konsep ini dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Maulina et al., 2021).

Keuangan daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Kesejahteraan masyarakat setempat akan lebih mudah tercapai apabila kondisi keuangan pemerintah daerah berada dalam keadaan yang baik. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang optimal, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan mengkaji faktor-faktor yang berpotensi menjadi peluang signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah (Maulina et al., 2021). Kinerja

keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pengelolaan keuangan secara tepat demi mempertahankan layanan yang diharapkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah ini penting, baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun pihak eksternal.

Solo Raya, yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah antara lain Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri, merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Pemerintah daerah di Solo Raya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ini yang menyebabkan penurunan pada pendapatan daerah terutama dari pajak dan retribusi, sehingga mempengaruhi stabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah (Fadila, 2024). Hal tersebut semakin diperparah saat pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 tersebut berdampak besar pada kinerja keuangan khususnya di Daerah Solo Raya (Syamsul et al., 2022). Konsekuensi dari tantangan tersebut terlihat dalam tren efisiensi keuangan pada berbagai daerah di Solo Raya.



Gambar 1. Tren Efisiensi Keuangan Daerah di Solo Raya tahun 2018-2023

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada tahun 2020, Kabupaten Sragen mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp368,3 miliar pada 2019 menjadi Rp394,4 miliar. Meskipun demikian, belanja daerah juga meningkat secara signifikan akibat peningkatan pengeluaran untuk bantuan sosial dan kesehatan, sehingga rasio efisiensi meningkat dari 91% pada 2019 menjadi 112% pada 2020. Kabupaten Sukoharjo mencatat peningkatan PAD dari Rp458,7 miliar pada 2019 menjadi Rp469,5 miliar pada 2020. Namun, rasio efisiensi keuangan Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019–2023 menunjukkan tren yang kurang terkendali. Pada tahun 2020, rasio efisiensi meningkat menjadi 102%, mencerminkan tingginya belanja daerah di tengah pandemi.

Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren efisiensi keuangan yang membaik pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Pada 2019, rasio efisiensi Kabupaten Karanganyar tercatat sebesar 104%, dengan realisasi PAD mencapai Rp387,7 miliar. Namun, pada tahun 2020, rasio efisiensi menurun menjadi 99%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penurunan rasio ini mencerminkan bahwa belanja daerah mengalami penyesuaian dan lebih terkendali seiring dengan menurunnya PAD dan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Meskipun PAD mengalami penurunan, belanja daerah juga mengalami penyesuaian sehingga rasio efisiensi tetap dalam batas yang lebih stabil. Setelah 2020, rasio efisiensi Kabupaten Karanganyar tetap stabil dalam kisaran 98% hingga 102% hingga 2023, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Pada tahun 2023, PAD Karanganyar

berhasil meningkat menjadi Rp441,8 miliar, yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih baik.

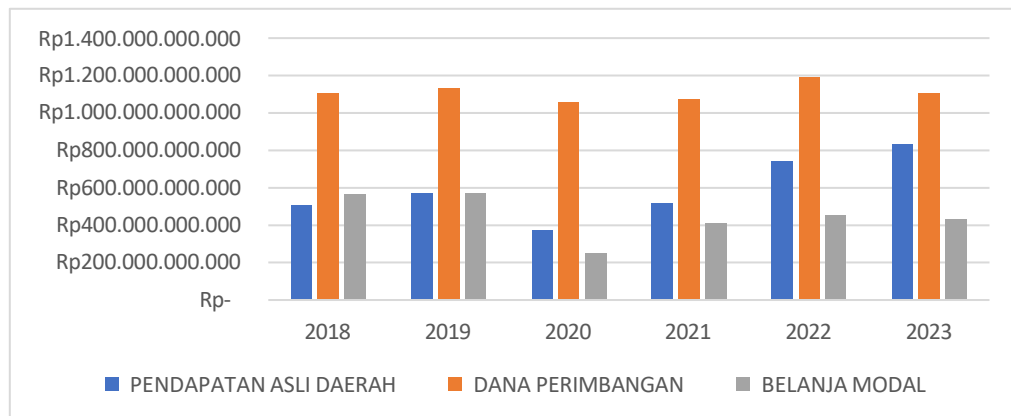
Kabupaten Boyolali, yang dikenal sebagai daerah dengan sektor industri dan agribisnis yang kuat, menunjukkan tren efisiensi yang lebih variatif. Pada tahun 2020, rasio efisiensi Kabupaten Boyolali turun menjadi 98%, dengan realisasi PAD sebesar Rp451,5 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio efisiensi Kabupaten Boyolali kembali meningkat hingga 104% pada 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah. Di sisi lain, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dana perimbangan pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Kabupaten Klaten mencatat rasio efisiensi sebesar 99% pada 2020, sedangkan Kabupaten Wonogiri mencapai 100% pada tahun yang sama. Penurunan dana perimbangan ini menandakan adanya tekanan fiskal yang semakin besar, terutama ketika pendapatan asli daerah juga mengalami tren selama pandemi

Di tengah dinamika efisiensi keuangan yang terjadi di Solo Raya, Kota Surakarta sebagai pusat ekonomi mengalami tren efisiensi keuangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi, kinerja keuangan Kota Surakarta cukup efektif dengan realisasi PAD mencapai 96,17%, menunjukkan pengelolaan pendapatan lokal yang baik. Namun, ketergantungan pada dana perimbangan pusat sudah mulai terlihat untuk menutupi kekurangan PAD dan mendukung belanja modal. Belanja modal sendiri tercatat kurang efisien, dengan rasio efisiensi sebesar 92,56% pada 2019 (Hapsari et al., 2022). Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, realisasi belanja modal

tidak sepenuhnya optimal, yang mengindikasikan perlunya strategi baru dalam pengelolaan dan alokasi anggaran.

Kasus Covid-19 pada 13 Maret 2020 menekan keuangan Kota Surakarta, terutama PAD dari sektor pariwisata. Menurut data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), pajak hotel dan pajak restoran turun drastis dari Rp96,7 miliar (2019), menjadi Rp13,9 miliar untuk pajak hotel dan Rp27,6 miliar untuk pajak restoran hingga Oktober 2020, seiring penurunan tingkat hunian hotel dari 70-80% menjadi 30-40% (Ricky, 2020). Banyak proyek belanja modal ditunda atau dibatalkan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19, menyebabkan realisasi belanja modal tidak optimal dan efisiensi menurun (Aipassa, 2021).

Pada periode akhir pandemi Covid-19, menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut belum mencapai target, dengan pencapaian hanya sebesar 87,48%. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang tidak mencapai target. Secara umum, rendahnya realisasi PAD tahun 2022 disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih (Mulato, 2023). Pasca berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta mengalami peningkatan menjadi Rp687,3 miliar, naik dari Rp647,4 miliar pada tahun 2022 (Nugraheni, 2024).



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kota Surakarta tahun 2018-2023.

Sumber : ppid.surakarta.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), Maulina et al. (2021), dan Nauw & Riharjo (2021) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Andirfa et al. (2016) dan Haque & Rohman (2022) menunjukkan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel dana perimbangan dalam penelitian

Mulyani & Wibowo (2017), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), dan Maulina et al. (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Andirfa et al. (2016), Nauw & Riharjo (2021), dan Haque & Rohman (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Variabel belanja modal dalam penelitian Andirfa et al. (2016), Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Nauw & Riharjo (2021), dan Haque & Rohman (2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Prastiwi & Aji (2020) dan Maulina et al. (2021) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah mengacu pada besar atau kecilnya pemerintah di suatu wilayah. Variabel ukuran pemerintah daerah dalam penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), dan Haque & Rohman (2022) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Maulina et al. (2021) ukuran pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh menunjukkan variasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ulang penelitian sebelumnya terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil yang diperoleh nantinya dapat memperjelas dan mendukung teori yang telah ada.

C. RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya?
- b. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya?
- c. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya?
- d. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Solo Raya, yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
- b. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
- c. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
- d. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan literatur dalam bidang ekonomi akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik dan umum, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah.

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori keagenan dalam konteks sektor publik, dengan menyoroti bagaimana kepercayaan antara principal dan agen dapat diperkuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi

pemangku kepentingan untuk meminimalkan konflik keagenan dalam pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah, dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah di Solo Raya maupun daerah lain dalam mengelola kinerja keuangan.

Hasil penelitian dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan fiskal dan keuangan yang tepat, terutama yang terakait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah.

Penelitian ini secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan ada ketika satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Purba (2023) Teori keagenan

adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan, yang bertindak sebagai agen, dan pemilik perusahaan, yang berperan sebagai prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melaksanakan semua aktivitas atas nama prinsipal. Sebagai pemilik, prinsipal selalu ingin mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk bagaimana manajemen mengelola dana yang telah diinvestasikan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh manajemen sebagai agen, prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus dapat menilai kinerja agen selama periode tertentu.

Dalam penelitian ini prinsipal adalah masyarakat dan pemerintah pusat, sedangkan agen adalah pemerintah daerah. Permasalahan yang sering muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) adalah asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi terjadi ketika pemerintah sebagai agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi internal instansi dibandingkan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Laporan ini digunakan masyarakat untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah tidak menyusun laporan keuangan secara lengkap dan konsisten karena alasan tertentu, yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Kondisi ini memungkinkan agen untuk melakukan kecurangan terhadap prinsipal (Nauw & Riharjo, 2021).

Selain masyarakat, pemerintah pusat juga berperan sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi untuk mengelola administrasi dan anggaran secara mandiri. Namun, karena adanya asimetri informasi, pemerintah daerah dapat menyembunyikan atau memanipulasi data keuangan serta laporan kinerja guna mempertahankan kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghambat pengawasan serta pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah harus dilakukan secara berkala, baik oleh masyarakat maupun pemerintah pusat, guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta transparan dan akuntabel (Nauw & Riharjo, 2021).

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diyakini akan menghasilkan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah yang baik menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mencapai otonomi daerah (Maulina et al., 2021).

Menurut Halim (2008) terdapat enam rasio yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk untuk menilai seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, khususnya dalam memanfaatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memberikan layanan publik secara optimal. Rasio efisiensi yang lebih tinggi menghasilkan kinerja yang kurang optimal, sedangkan rasio efisiensi yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang baik.

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
<100%	Efisien

Sumber : (Mahsun, 2012)

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah (Mulyani & Wibowo, 2017):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{TRPng}}{\text{TRPn}}$$

Keterangan:

TRPng = Total Realisasi Pengeluaran

TRPn = Total Realisasi Penerimaan

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud, meliputi

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Digdowiseiso et al. (2022), semakin tinggi jumlah PAD dalam APBD, maka semakin rendah ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung kinerja makroekonomi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel PAD adalah (Mulyani & Wibowo, 2017):

$$PAD = PD + RD + HPKD + LPS$$

Keterangan:

- | | |
|-----|--------------------------|
| PAD | = Pendapatan Asli Daerah |
| PD | = Pajak Daerah |
| RD | = Retribusi Daerah |

HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
LPS = Lain-lain PAD yang Sah

4. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Dana ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dengan sistem pembayaran yang adil, rasional, proporsional, transparan, partisipatif, serta akuntabel. Selain itu, dana perimbangan juga memberikan kepastian terhadap sumber keuangan yang berasal dari daerah terkait (Nauw & Riharjo, 2021). Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efisiensi. Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel dana perimbangan adalah (Mulyani & Wibowo, 2017):

$$DP = DBH + DAU + DAK$$

Keterangan:

DP	= Dana Perimbangan
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus

5. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal merupakan salah satu indikator produktivitas dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase alokasi untuk belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih produktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemanfaatan aset yang dihasilkan seringkali terkait dengan pelayanan publik dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Digdowiseiso et al., 2022). Dengan demikian, semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja daerah menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja

modal, semakin tinggi pula kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017). Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel belanja modal adalah (Haque & Rohman, 2022):

$$BM = T + PM + GB + JIJ + ATL + AL$$

Keterangan:

BM	= Belanja Modal
T	= Belanja Modal Tanah
PM	= Belanja Modal Peralatan dan Mesin
GB	= Belanja Modal Gedung dan Bangunan
JIJ	= Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan
ATL	= Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
AL	= Belanja Modal Aset Lainnya

6. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah mengacu pada besar atau kecilnya pemerintah di suatu wilayah. Besarnya ukuran pemerintah daerah biasanya dihubungkan dengan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki ukuran lebih kecil. Pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sementara pemerintah yang lebih kecil mungkin menghadapi lebih banyak kendala dalam melaksanakan aktivitas operasional tersebut (Haque & Rohman, 2022). Dengan demikian, semakin besar ukuran suatu daerah yang ditandai dengan jumlah penduduk yang tinggi, diharapkan kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Dengan ukuran pemerintah daerah yang lebih besar, kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efisiensi diharapkan semakin optimal (Mulyani & Wibowo, 2017). Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran pemerintah daerah adalah (Sari & Mustanda, 2019):

$$UPD = LN(\text{Total Aset})$$

Keterangan:

UPD = Ukuran Pemerintah

LN = Logaritma Natural

F. PENELITIAN TERDAHULU

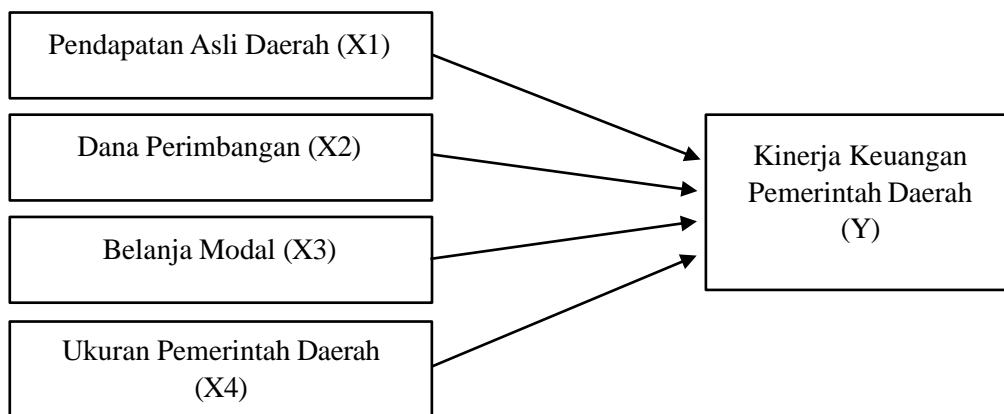
Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Andirfa et al. (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh	Regresi Linear Berganda	Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Noviyanti & Kiswanto (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	Ukuran Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah TKD berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. TKP berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran Legislatif berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3	Mulyani & Wibowo (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)	Regresi Linear Berganda	Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Sari & Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5	Anisa (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6	Prastiwi & Aji (2020)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2019)	Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7	Maulina et al. (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
8	Nauw & Riharjo (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
9	Haque & Rohman (2022)	Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020	Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

G. KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Sumber: (Mulyani & Wibowo, 2017), (Maulina et al., 2021), dan (Haque & Rohman, 2022)

H. PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. PAD yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah mampu mengurangi

ketergantungan pada bantuan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (Prastiwi & Aji, 2020). Dalam penelitian penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), Maulina et al. (2021), dan Nauw & Riharjo (2021) diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

2. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan serta mengurangi ketimpangan sumber pembiayaan antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dana perimbangan juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Dalam penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), dan Maulina et al. (2021) diperoleh hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

3. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Peningkatan belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan ini, realisasi PAD akan turut bertambah secara tidak langsung. Pembangunan infrastruktur daerah, seperti fasilitas umum, merupakan salah satu bentuk belanja modal yang mendukung pertumbuhan pendapatan daerah, serta kinerja keuangan daerah akan menjadi lebih baik (Sari & Mustanda, 2019). Dalam penelitian Andirfa et al. (2016), Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Nauw & Riharjo (2021), dan Haque & Rohman (2022) diperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

4. Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan melalui total aset daerah, merupakan salah satu indikator untuk menilai kemudahan operasional di tingkat daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin mudah pula pelaksanaan kegiatan operasional serta jalannya roda pemerintahan. Selain mempermudah operasional, ukuran pemerintah daerah yang besar juga memfasilitasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi PAD dan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari & Mustanda,

2019). Dalam penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), dan Haque & Rohman (2022) diperoleh hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

I. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri. Obyek penelitian yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Solo Raya tahun 2018-2023.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tujuannya untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antar variabel penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
- b. Data atau informasi yang digunakan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Daerah di Solo Raya tahun 2018-2023.

- c. Data diolah dan dianalisis menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan berbagai asumsi maupun proses pengujian yang berlaku.
- d. Hasil penelitian diinterpretasikan dan diimplikasikan untuk menjawab rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Penelitian

1) Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran pencapaian hasil kerja di bidang keuangan, mencakup anggaran serta realisasinya, dengan penekanan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio efisiensi.

2) Variabel Independen

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

d) Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah konsep yang mengacu pada berbagai indikator dan parameter yang digunakan untuk menilai besaran serta kapasitas suatu entitas pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah diukur menggunakan logaritma natural total aset.

b. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Mulyani & Wibowo, 2017)	Rasio Efisiensi = $\frac{TRP_{ng}}{TRP_n}$	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mulyani & Wibowo, 2017)	$PAD = PD + RD + HPKD + LPS$	Nominal	Laporan Realisasi Anggaran
3	Dana Perimbangan (Mulyani & Wibowo, 2017)	$DP = DBH + DAU + DAK$	Nominal	Laporan Realisasi Anggaran
4	Belanja Modal (Haque & Rohman, 2022)	$BM = T + PM + GB + JIJ + ATL + AL$	Nominal	Laporan Realisasi Anggaran
5	Ukuran Pemerintah Daerah (Sari & Mustanda, 2019)	$UPD = LN (\text{Total Aset})$	Nominal	Neraca

Keterangan:

TRP_{ng} = Total Realisasi Pengeluaran

TRP_n = Total Realisasi Penerimaan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

LPS = Lain-lain PAD yang Sah

DP = Dana Perimbangan

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

BM = Belanja Modal

T = Belanja Modal Tanah

PM = Belanja Modal Peralatan dan Mesin

GB = Belanja Modal Gedung dan Bangunan

JIJ = Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan

ATL = Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

AL = Belanja Modal Aset Lainnya

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah

LN = Logaritma Natural

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian (Suriani et al., 2023). Populasi dalam penelitian ini yaitu Daerah di Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri.

Sampel adalah bagian kecil dari obyek penelitian yang dimiliki oleh suatu populasi (Suriani et al., 2023). Penelitian ini menggunakan sampel jenuh sebagai teknik untuk menentukan sampelnya. *Sampling* jenuh merupakan metode penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau diukur secara langsung dalam bentuk angka atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Pemerintah Daerah di Solo Raya tahun 2018-2023.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, termasuk informan atau subjek penelitian, serta data dokumenter yang mencakup kajian pustaka, arsip, catatan tertulis, dan bagan yang relevan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi daerah di Solo Raya yang berperan dalam bidang keuangan daerah, berikut adalah beberapa instansi daerah yang telah menyediakan data untuk mendukung penelitian ini:

- a. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
- b. Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar
- c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sukoharjo

- d. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Klaten
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Sragen
- f. Badan Keuangan Daerah Kab. Boyolali
- g. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Wonogiri

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara mengumpulkan arsip dokumen resmi yang diperoleh dari beberapa instansi daerah di Solo Raya, serta studi literatur dengan cara mengidentifikasi metode analisis dan variabel penelitian yang telah digunakan sebelumnya.

7. Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik untuk mengelola data sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai suatu fenomena. Analisis deskriptif digunakan untuk mengolah sejumlah data dengan cara melihat nilai *minimum* (min) dan *maksimum* (max), *mean*, dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan, terdapat korelasi antara variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, serta untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak (Saputri & Kurnia, 2020). Uji statistik yang digunakan adalah Uji

Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan pengujian normalitas data yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018).

- a) Data dikatakan normal jika *Asymp. Sig.* > 0,05,
- b) Data dikatakan tidak normal jika *Asymp. Sig.* < 0,05.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Untuk menguji adanya multikolinieritas, dapat dilakukan dengan memeriksa nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018).

- a) Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas,
- b) Apabila nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* < 0,10, maka terjadi multikolinieritas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Jika ditemukan korelasi tersebut, maka hal ini disebut sebagai masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW) yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018).

- a) Jika $d < dL$ atau $d > 4-dL$, maka terdapat autokorelasi,
- b) Jika $dU < d < 4-dU$, maka tidak terdapat autokorelasi,
- c) Jika $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$, maka tidak ada kesimpulan.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat menggunakan pola gambar *Scatterplot*, prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Analisis *Scatterplot* dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas, jika (Ghozali, 2018):

- a) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah sekitar angka 0.
- b) Titik-titik penyebarannya tidak boleh membentuk pola pada satu tempat tertentu yang membentuk gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

c. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel independen dan dependen, serta pengaruh variabel independen terhadap dependen. Regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Maulina et al., 2021).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien dari variabel independen
X_1	= Pendapatan Asli Daerah
X_2	= Dana Perimbangan
X_3	= Belanja Modal
X_4	= Ukuran Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
ε	= <i>error terms</i>

2) Uji t

Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan setelah memastikan model bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Signifikansi 5% menunjukkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, sementara tingkat kepercayaan 95% digunakan sebagai dasar keputusan. Cara mengetahui uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018).

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima,
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada dasarnya mengindikasikan apakah seluruh variabel independen yang dalam dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dijelaskan melalui Analysis of Variance (ANOVA) dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Cara menguji hipotesis dengan uji F adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018).

- a) Jika nilai probabilitas ($\text{sign} < 0,05$) maka, H_0 ditolak dan H_a diterima,
- b) Jika nilai probabilitas ($\text{sign} > 0,05$) maka, H_0 diterima dan H_a ditolak.

4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilainya berkisar antara nol hingga satu. Koefisien determinasi (R^2) yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk memprediksi variasi variabel dependen secara maksimal, nilai koefisien determinasi (R^2) sebaiknya mendekati satu. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai *Adjusted R-Square* (Ghozali, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.
- Anisa, B. C. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, dana perimbangan dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. *STIE Perbanas*, 1–15.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580.
- Fadila, S. N. (2024, November). Kemenkeu ungkap sejumlah tantangan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. *Kontan*. https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-ungkap-sejumlah-tantangan-dalam-pemungutan-pajak-daerah-retribusi-daerah#google_vignette
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ketiga). Salemba Empat.
- Hapsari, M., Winarsih, E., & Prabawa, S. T. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran pada pemda Kota Surakarta di era pandemi covid-19. *Edunomika*, 6(2), 1–11.
- Haque, K. S., & Rohman, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta : BPFPE.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>

- Mulato. (2023, April 6). Jawaban Pemkot Solo Perihal PAD 2022 Tak Capai Target. *RRI*, 1–6. <https://www.rri.co.id/daerah/206467/jawaban-pemkot-solo-perihal-pad-2022-tak-capai-target>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015). *KOMPARTEMEN*, 15(1), 57–66.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Nugraheni, A. I. (2024). *Indikator Ekonomi Kota Surakarta 2023* (C. Fitriani, Ed.). Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12, JDIH BPK 1 (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71, JDIH BPK 1 (2010).
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group. <https://www.researchgate.net/publication/369793571>
- Ricky, M. (2020, October 23). Pemkot Solo Kehilangan 50% Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Gara-Gara Pandemi. *Solopos*, 1–4. <https://solopos.espos.id/pemkot-solo-kehilangan-50-pendapatan-pajak-hotel-dan-restoran-gara-gara-pandemi-1087940>
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1, 1–21.

- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759–4787. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). Krisis pandemi covid-19: Dampaknya pada pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi. *Keunis*, 10(2), 1–0.
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33, JDIH BPK 1 (2004).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mega Yunita Prassiwi
NIM : 2021522544
Jurusan/Progdi : Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 27 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : -
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Pekerjaan Orang Tua : DPRD Kota Surakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Begalon 2 Surakarta
2. SMP Negeri 9 Surakarta
3. SMK Negeri 6 Surakarta

Pengalaman Kerja :

1. Magang Wirausaha Yusuf Guppy Farm
2. Relawan Pajak KPP Pratama Surakarta

Surakarta, 04 Desember 2024



Mega Yunita Prassiwi